



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARSUL SANI**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA MPR RI**
3. NHK : **214401**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **30.940.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1396 m2/600 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/115 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Bangunan Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 14037 m2/600 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
5. Tanah Seluas 2916 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.050.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **262.750.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.750.000



3. MOBIL, NISSAN ELGRAND JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 124.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 54.700.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.264.849.452

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 36.646.999.452

III. HUTANG Rp. 2.215.418.251

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.431.581.201

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.